

ABSTRAKS

Dimas Ismawan Wildani: “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan A.H Nasution Kota Bandung”

Kebijakan merupakan suatu cara yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan dilaksanakan di Kabupaten Kota seluruh Indonesia, setiap daerah menyelesaikan kebijakan ini melalui Perda, masing-masing daerah termasuk Kota Bandung menyelesaikan permasalahan melalui Perda No. 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Perda Kota Bandung No 4 tahun 2011 ini dikeluarkan pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikan permasalahan pedagang kaki lima. Fenomena yang terjadi dalam penelitian awal ini adalah masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan A.H Nasution Kota Bandung, padahal jalan tersebut merupakan jalan yang masuk zona merah dimana pedagang dilarang berjualan di area tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di jalan A.H Nasution Kota Bandung.

Penelitian ini terdiri dari satu variabel , yaitu implementasi kebijakan. Penulis menggunakan teori George C. Edward III dimana keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi..

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Informan pada penelitian ini adalah petugas Satpol PP dan pedagang kaki lima. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perda ini digunakan langkah-langkah analisis data dari hasil wawancara menurut Miles and Huberman yang terdiri atas tiga tahap yaitu (1) tahap reduksi data, (2) tahap display data, (3) tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil pengolahan data didapat hasil bahwasannya implementasi Perda No 4 tahun 2011 ini belum berjalan maksimal, karena masih banyak ditemukan pedagang yang berjualan di zona larangan berdagang atau zona merah. Penyebabnya karena kurangnya pengawasan yang dilakukan petugas Satpol PP, kurangnya pengawasan disebabkan karena minimnya jumlah petugas Satpol PP, kurangnya komunikasi dan kordinasi dengan pihak terkait dan jauhnya Jalan A.H Nasution dari kantor Satpol PP sehingga menyulitkan pengawasan. Jalan A.H Nasution merupakan jalan yang masuk zona merah menurut Perda No 4 tahun 2011.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Dimas Ismawan Wildani: “The Implementation of Bandung’s Regional Regulation No. 4 of 2011 regarding the Arrangement and the Development of Street Vendors in Jalan A. H. Nasution Bandung”

A policy is a plan made by government to solve the problems in the community. The policy is implemented in each regional city in Indonesia. Each region fulfills this policy through Regional Regulation. Each region including Bandung, overcomes this problem by using Regional Regulation No. 4 of 2011 regarding the Arrangement and the Development of Street Vendors. This Bandung’s Regional Regulation No. 4 of 2011 is made by the government of Bandung to solve the street vendor problems. The phenomenon that occurs in this early observation shows that there are many street vendors in A. H. Nasution street in Bandung despite the fact that the street belongs to the red zone where any trading is prohibited in that area.

This research aims to find out how the implementation and the problems appeared in performing the Regional Regulation of Bandung No. 4 of 2011 regarding the arrangement and the development of street vendors in A. H. Nasution street Bandung.

This research consists of one variable. It is the implementation of a policy as single variable. The researcher used a theory of George C. Edward III which suggests that the success of a policy implementation is determined by four variables, they are: (1) communication; (2) resources, (3) disposition; and (4) bureaucratic structure.

The research method used is descriptive method with qualitative approach. The kind of data used are primary data and secondary data. The technique of collecting data is interview, observation, and library research. The interviewees in this research are Public Order Enforcers and street vendors. To find out the implementation of this Perda, the analysis of the interview’s results are conducted with these three steps: (1) reducing data; (2) display data; and (3) drawing conclusion and verification.

Based on the data analysis, the result shows that the Regional Regulation No 4 of 2011 is not effectively implemented, as many vendors are found selling in the prohibited area or red zone. The lack of supervision by Public Order Enforcers can be the factor. This happened because of the minimum number of Public Order Enforcers, the lack of communication and coordination of related parties, and the quite distance between A.H. Nasution street and the Public Order Enforcers office that makes the supervision obstructed. In fact, A. H. Nasution street is included as red-zoned street according to Regional Regulation No. 4 of 2011.

Keyword : *Implementation of Policy, Regional Regulation, Street Vendors*